



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 27 Mei 2017

Halaman: 1

Penertiban Menara Masih Diperdebatkan

JOGJA, BERNAS - DPRD Kota Yogyakarta segera mengejar pengesahan Raperda tentang Penataan Menara Telekomunikasi yang telah lama menggantung. Pengesahan Raperda ini penting karena akan segera diikuti dengan penertiban menara telekomunikasi tak berizin.

Ketua pansus, Agung Damar Kusumandaru, menilai sudah selayaknya raperda segera disahkan. Selain dari sisi substansi tak ada kendala, menurutnya, jika raperda sudah diundangkan maka bisa menjadi payung hukum yang jelas bagi upaya penertiban dan penataan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

"Pansus juga sudah bersepakat dengan eksekutif, bahwa penertiban akan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak Raperda disahkan menjadi Perda," kata Agung, Jumat (26/5).

Dalam lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi, tercatat ada 222 menara yang kini berdiri di Kota Yogyakarta. Namun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

Di internal pansus, Raperda Menara Telekomunikasi terbelah. Wakil ketua pansus, Cristiana Agustina, minta ada penertiban dulu sebelum raperda disahkan. Sikap Ana yang juga Ketua Komisi C itu mendapat dukungan dari mayoritas koleganya di legislatif.

Menurut politikus Gerindra ini, tanpa berbekal perda, Pemkot sudah memiliki pijakan regulasi berupa Perwal 61/2011 tentang pembatasan pendirian menara telekomunikasi dan Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, mengakui antar-fraksi belum ada kesepakatan bulat. Pihaknya pun siap untuk berembuk mencari jalan tengah. "Ditengah belum adanya kesepakatan antar-fraksi, maka kita segera ambil jalan tengah," ujarnya.

Melihat materi draf Raperda Menara Telekomunikasi, sebenarnya tak alasan untuk tidak segera disahkan. Hanya saja jika melihat dinamika selama ini, ada tuntutan dari fraksi yang harus secepatnya direspon oleh Pemkot Yogyakarta, yaitu agar dilakukan penertiban seluruh menara ilegal sebelum digelar rapat paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi.

Mayoritas fraksi mendukung? pengembalian draf raperda ke Komisi C selaku pengusul Raperda Menara Telekomunikasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap Pemkot yang tak kunjung menertibkan seluruh menara ilegal.

"Ini memang ranah pimpinan untuk mengkomunikasikan, untuk menjembatani agar polemik ini secepatnya ada solusi," ujarnya.

Hasil rapat pimpinan nanti diakuinya akan dibahas bersama fraksi-fraksi untuk memunculkan sebuah rekomendasi. Yaitu apakah akan ada dorongan agar segera dijadwalkan paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi, atau sebaliknya, memberikan rekomendasi kepada Pemkot agar menertibkan lebih dulu seluruh menara ilegal.

"Saya pribadi memang tidak mau ada menara yang berdiri ilegal, bahkan berada di atas taman, trotoar, dan fasilitas publik lainnya. Harus ada penertiban dan penataan," tandas politikus PDIP itu. (age)



Tindak Lanjut	
☐ Untuk Ditanggapi	
☒ Untuk Diketahui	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005